

## **BAB II**

### **CORPORATE GOVERNANCE, PENGUNGKAPAN EMISI KARBON, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Teori Stakeholder**

Teori pemangku kepentingan ini diciptakan oleh Edward Freeman pada tahun 1984. Penelitian ini didasarkan pada teori pemangku kepentingan karena pengungkapan emisi karbon bukan hanya untuk kepentingan pemegang saham saja tetapi juga untuk kepentingan *stakeholder* lainnya. Kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh para *stakeholder*, serta setiap perusahaan pasti memiliki *stakeholder* yang berbeda-beda (Feijoo *et al.*, 2012). Menurut Olayinka (2021), teori pemangku kepentingan ini berpendapat bahwa tidak ada organisasi yang dapat beroperasi tanpa berinteraksi dengan lingkungan. Kepentingan *stakeholder* lainnya seperti pelanggan, karyawan, kreditur, pemerintah, dan masyarakat harus diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Chariri & Ghozali (2007) mendukung teori ini dengan mengemukakan bahwa perusahaan dalam beroperasi bukan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri melainkan juga memberi manfaat bagi para *stakeholder*-nya. Perusahaan seharusnya tidak hanya fokus pada memaksimalkan pengembalian pemegang sahamnya, tetapi juga berusaha memenuhi harapan *stakeholder* lainnya. Harapan sekaligus tekanan terkait sosial dan lingkungan dari para *stakeholder* terutama pihak pemerintah, media serta masyarakat meningkat seiring berkembangnya isu-isu sosial dan lingkungan.

Adanya *corporate governance* yang baik dalam suatu perusahaan diharapkan semakin meningkatkan kemungkinan diungkapkannya emisi karbon sehingga perusahaan dapat memenuhi harapan serta tekanan dari para *stakeholder* terkait dengan masalah sosial dan lingkungan.

## 2.2. Teori Legitimasi

Menurut Suchman (1995), legitimasi merupakan persepsi atau asumsi khalayak umum bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, tepat atau sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang diadakan secara sosial. Teori legitimasi berpendapat bahwa perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari masyarakat (Amaliyah & Solikhah, 2019). Chariri dan Ghozali (2007) juga berpendapat bahwa perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari komunitas dimana perusahaan itu berada dan meningkatkan intensitas keuangannya dalam jangka panjang.

Kehadiran perusahaan ditengah-tengah lingkungan masyarakat, menimbulkan tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat terkait dampak lingkungan dari kegiatan bisnis perusahaan. Pengungkapan emisi karbon ini sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat serta membantu perusahaan untuk mendapat pengakuan serta atensi dari masyarakat bahwa perusahaan telah menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dan telah beroperasi sesuai dengan norma yang dimiliki masyarakat. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip *corporate governance*

dalam suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pengungkapan emisi karbon sehingga hal ini dapat membantu perusahaan untuk mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa perusahaan telah menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungannya.

### **2.3. Emisi Karbon**

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional emisi karbon atau emisi gas rumah kaca merupakan lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. Atmosfer bumi terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen dan 1% gas rumah kaca. Gas rumah kaca sebenarnya tidak buruk, tetapi jika terlalu banyak bisa berakibat negatif bagi bumi. Emisi gas rumah kaca terdiri dari berbagai macam gas, salah satunya karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Maka dari itu, emisi gas rumah kaca sering disebut juga emisi karbon. Sebagian besar emisi karbon dihasilkan dari aktivitas sehari-hari manusia seperti transportasi, penggunaan listrik, aktivitas industri, dan kegiatan lainnya yang menggunakan bahan bakar fosil biasanya menghasilkan emisi karbon.

#### **2.3.1. Pengungkapan Emisi Karbon**

Perusahaan dituntut agar tidak hanya mengungkapkan informasi tentang keuangannya saja, tetapi juga informasi mengenai aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan. Pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu pengungkapan aktivitas

sosial dan lingkungan. Namun, pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih menjadi pengungkapan sukarela. Padahal, selain menjadi tanggung jawab sosial perusahaan, pengungkapan emisi karbon juga dapat bermanfaat untuk meningkatkan reputasi perusahaan di kalangan masyarakat.

Dalam penelitian ini, indikator pengukuran pengungkapan emisi karbon diadopsi dari penelitian Choi, *et al.* (2013). Choi, *et al.* (2013) mengembangkan “*checklist*” tersebut berdasarkan lembar permintaan informasi yang diberikan oleh *Carbon Disclosure Project* (CDP). CDP adalah organisasi nirlaba yang menyelenggarakan sistem pengungkapan global bagi investor, perusahaan, kota, dan negara untuk mengelola dampak lingkungan. Berikut ini merupakan indikator pengungkapan emisi karbon yang digunakan dalam penelitian ini:

**Tabel 2. 1**  
*Carbon Disclosure Checklist*

<b>Kategori</b>	<b>Item</b>
Perubahan Iklim: Risiko dan Peluang (CC/ <i>Climate Change</i> )	CC-1: Penilaian/deskripsi terhadap risiko (peraturan/regulasi baik khusus maupun umum) yang berkaitan dengan perubahan iklim dan tindakan yang diambil untuk mengelola risiko tersebut.
	CC-2: Penilaian/deskripsi saat ini (dan masa depan) dan implikasi keuangan, bisnis dan peluang dari perubahan iklim
Emisi Gas Rumah Kaca (GHG/ <i>Green House Gas</i> )	GHG-1: Deskripsi metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi gas rumah kaca (contoh: protokol GRK atau ISO)
	GHG-2: Keberadaan verifikasi eksternal kuantitas emisi GRK oleh siapa dan atas dasar apa
	GHG-3: Total emisi gas rumah kaca (metric ton CO <sub>2</sub> yang dihasilkan).

	GHG-4: Pengungkapan lingkup 1 dan 2, atau 3 emisi GRK langsung.
	GHG-5: Pengungkapan emisi GRK berdasarkan asal atau sumbernya (misalnya: batu bara, listrik, dll).
	GHG-6: Pengungkapan emisi GRK berdasarkan fasilitas atau level segmen
	GHG-7: Perbandingan emisi GRK dengan tahun-tahun sebelumnya.
Konsumsi Energi (EC/ <i>Energy Consumption</i> )	EC-1: Jumlah energy yang dikonsumsi (misalnya tera-joule atau PETA-joule)
	EC-2: Kuantifikasi energy yang digunakan dari sumber daya yang dapat diperbaharui
	EC_3: Pengungkapan menurut jenis, fasilitas atau segmen.
Pengurangan Gas Rumah Kaca dan Biaya (RC/ <i>Reduction and Cost</i> )	RC-1: Detail/rincian dari rencana atau strategi untuk mengurangi emisi GRK.
	RC-2: Spesifikasi dari target tingkat/level dan tahun pengurangan emisi GRK.
	RC-3: Pengurangan emisi dan biaya terkait atau penghematan yang dicapai hingga saat ini sebagai hasil dari rencana pengurangan.
	RC-4: Biaya emisi masa depan diperhitungkan dalam rencana belanja modal ( <i>capital expenditure planning</i> )
Akuntabilitas Emisi Karbon (AEC/ <i>Accountability of Carbon</i> )	AEC-1: Indikasi dimana dewan komite (atau badan eksekutif lainnya) memiliki tanggung jawab atas tindakan yang berkaitan dengan perubahan iklim.
	AEC-2: Deskripsi mekanisme dimana dewan (atau badan eksekutif lainnya) meninjau kemajuan perusahaan mengenai perubahan iklim.

Sumber: Choi, *et al.* (2013)

#### 2.4. *Corporate Governance*

Menurut Ghazali (2010), tata kelola perusahaan atau corporate governance adalah suatu sistem yang dibentuk oleh para pemegang saham untuk meningkatkan efisiensi manajemen sehingga dapat memberika nilai yang maksimal. Sedangkan

menurut FCGI (*Forum Corporate Governance in Indonesia*), *good corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemilik kepentingan pengurus, pihak kreditur, pemerintah dan karyawan serta pemegang kepentingan internal maupun eksternal lain sehubungan dengan hak dan kewajiban, atau bisa dikatakan sebagai sistem yang berusaha mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan.

#### **2.4.1. Mekanisme Corporate Governance**

Dalam sebuah perusahaan terdapat organ-organ yang berfungsi untuk mengelola kegiatan operasional perusahaan, antara lain yaitu:

1. Dewan Direksi

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, dewan direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

2. Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan baik secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.

### 3. Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan.

### 4. Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/POJK.04/2015, komite audit merupakan komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.

#### **2.4.2.Prinsip- Prinsip *Corporate Governance***

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governansi (2006), terdapat lima prinsip *corporate governance*, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Transparansi (*transparency*)

Perusahaan harus terbuka atas informasi yang berhubungan dengan kegiatan bisnis perusahaan kepada seluruh *stakeholder*-nya. Perusahaan juga diharapkan mengungkapkan seluruh hal-hal penting baik bagi pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Mengacu pada penelitian Tristiarini (2005), transparansi diukur dengan:

##### a. Kelengkapan Laporan Keuangan

Terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Masing-masing dari laporan keuangan tersebut diberikan bobot 1.

b. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus diserahkan selambat-lambatnya 120 hari setelah tahun buku perusahaan berakhir disertai dengan laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Jika perusahaan menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu maka diberi bobot 1, jika tidak diberi bobot 0.

c. Kelengkapan Laporan Non-Keuangan yang Disajikan dalam Laporan Tahunan

Terdiri dari Laporan Manajemen, Ikhtisar Data Keuangan Penting, serta Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen. Jika disajikan dalam laporan tahunan perusahaan, maka masing-masing laporan diberi bobot 1.

d. Kelengkapan Laporan Tahunan RUPS

Terdiri dari pengumuman dividen, kepemilikan saham, serta kepengurusan dan kebijakan perusahaan. Jika disajikan dalam laporan tahunan RUPS, masing-masing item diberi bobot 1.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan wajib bertanggungjawab atas informasi mengenai rangkaian pelaksanaan kegiatan bisnisnya kepada pemegang saham dan pemangku

kepentingan lainnya. Mengacu pada penelitian Tristiarini (2005), akuntabilitas diukur dengan:

- a. Jika susunan komite audit perusahaan lengkap, artinya terdiri dari tiga orang, dipimpin oleh seorang komisaris independen. Maka, akan diberi bobot 1, jika tidak diberi bobot 0.
  - b. Jika perusahaan menyajikan laporan komite audit dalam laporan tahunan maka diberi bobot 1, jika tidak diberi bobot 0.
  - c. Jika komite audit mengadakan rapat minimal dalam tiga bulan maka diberi bobot 1, jika tidak diberi bobot 0.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
- Perusahaan harus taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Mengacu pada penelitian Tristiarini (2005), *responsibility* terdiri dari kendali mutu dan standarisasi, uraian keikutsertaan perusahaan dalam kegiatan pelayanan dan program kemasyarakatan, pengembangan SDM, dan lingkungan hidup. Jika disajikan dalam laporan tahunan maka masing-masing item diberi bobot 1, jika tidak diberi bobot 0.
4. Kemandirian (*independency*)
- Dalam menjalankan seluruh kegiatan bisnisnya, perusahaan tidak dipengaruhi oleh kepentingan dan tekanan dari pihak manapun sehingga tiap-tiap organ perusahaan tidak saling mendominasi dan melempar tanggung jawab. Mengacu pada penelitian Santoso (2022), kemandirian diukur

berdasarkan RUPS. Jika perusahaan melakukan RUPS minimal satu kali dalam satu periode maka akan diberi bobot 1, jika tidak diberi bobot 0.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Perlakuan perusahaan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya harus adil serta perusahaan harus berusaha memenuhi hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, kewajaran yang dimaksud yaitu adanya kewajaran laporan keuangan yang diberikan oleh auditor independen kepada perusahaan. Mengacu pada penelitian Tristiarini (2005), berikut indikator untuk mengukur kewajaran dan kesetaraan, jika:

- a. Tidak memberikan opini diberi bobot 1
- b. Opini tidak wajar diberi bobot 2
- c. Opini wajar dengan pengecualian diberi bobot 3
- d. Opini wajar tanpa pengecualian diberi bobot 4

## 2.5. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 2**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1	Okudo & Amahulu (2021)	<b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> <i>Carbon Disclosure Practices</i>	Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria per 31 Desember 2020.	- <i>Ownership structure</i> berpengaruh positif signifikan terhadap

		<p><b>Variabel Independen:</b>  <i>Corporate Governance</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ownership structure</i></li> <li>- <i>Gender diversity</i></li> <li>- <i>Sustainability committee</i></li> </ul>		<p><i>carbon disclosure practice.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Gender diversity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>carbon disclosure practice.</i></li> <li>- <i>Sustainability committee</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>carbon disclosure practice.</i></li> </ul>
2	Elsayih <i>et al.</i> (2021)	<p><b>Variabel Dependen:</b>  <i>Carbon Emission Performance</i></p> <p><b>Variabel Independen:</b>  <i>Corporate Governance</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Board meetings</i></li> <li>- <i>Board independence</i></li> <li>- <i>Board gender diversity</i></li> <li>- <i>Environmental committee</i></li> <li>- <i>Ownership concentration</i></li> </ul>	Seluruh perusahaan Australia yang ada di CDP database selama periode tahun 2010- 2018.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Concentration ownership</i> dan <i>board meetings</i> berpengaruh negatif terhadap <i>carbon emission performance.</i></li> <li>- <i>Board independence</i>, <i>board gender diversity</i> dan <i>environmental committee</i> berpengaruh positif terhadap <i>carbon</i></li> </ul>

				<i>emission performance.</i>
3	Grediani <i>et al</i> (2020)	<p><b>Variabel Dependen:</b> Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca</p> <p><b>Variabel Independen:</b> <i>Corporate Governance</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proporsi anggota dewan komisaris independen</li> <li>- Proporsi anggota dewan komisaris perempuan</li> <li>- Ukuran dewan</li> <li>- Jumlah anggota komite audit</li> <li>- Frekuensi rapat komite audit</li> </ul>	Perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proporsi anggota dewan komisaris dan frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca.</li> <li>- Proporsi anggota dewan komisaris perempuan, ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca.</li> </ul>
4	Sari & Susanto (2021)	<p><b>Variabel Dependen:</b> Pengungkapan Emisi Karbon</p> <p><b>Variabel Independen:</b> <i>Green strategy, corporate social responsibility disclosure,</i></p>	Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Green strategy dan corporate social responsibility disclosure berpengaruh positif terhadap penungkapan emisi karbon.</li> </ul>

		<i>corporate governance</i> - Kepemilikan institusional - Kepemilikan manajerial - Independensi dewan komisaris - Komite audit		- Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, independensi dewan komisaris, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
--	--	--	--	---

Sumber: Penelitian Terdahulu

## 2.6. Pengembangan Hipotesis

### 2.6.1. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Menurut KNKG (2006), transparansi merupakan sifat terbuka akan informasi oleh suatu perusahaan terkait aktivitas bisnisnya kepada seluruh pemangku kepentingannya. Perusahaan diharapkan tidak hanya menyajikan informasi yang diwajibkan oleh undang-undang saja, tetapi juga informasi yang tidak diatur oleh undang-undang, apalagi informasi yang penting dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa selain kepentingan organisasinya sendiri, perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan, harapan, serta tekanan dari *stakeholder*-nya. Dengan diterapkannya prinsip keterbukaan, perusahaan akan berusaha mempublikasi seluruh informasi terkait seluruh kegiatan yang terjadi dalam perusahaan termasuk emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan guna memenuhi harapan dan tekanan

para *stakeholder* yang nantinya juga akan meningkatkan kepercayaan mereka. Hal tersebut nanti akan berdampak pada peningkatan dukungan dan investasi. Maka, semakin tinggi transparansi di sebuah perusahaan, maka semakin tinggi pula kemungkinan emisi karbon diungkapkan.

**HA<sub>1</sub>: Transparansi berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.**

### **2.6.2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon**

Menurut KNKG (2006), akuntabilitas merupakan tanggung jawab perusahaan atas kinerjanya terhadap para pemangku kepentingannya secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola dengan benar sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tidak lupa untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem pengendalian internalnya efektif serta rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan jelas. Sehingga, perusahaan dapat bertanggungjawab atas kinerjanya melalui laporan-laporan yang diterbitkan oleh perusahaan karena adanya pembagian tugas yang adil dan sesuai serta perusahaan bisa berjalan dengan efektif tanpa mengesampingkan kepentingan para *stakeholder*-nya sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan para *stakeholder*-nya juga. Perusahaan yang bertanggungjawab dan akuntabel pasti akan berusaha memenuhi tekanan dari para *stakeholder*-nya seperti mengungkapkan emisi karbonnya dalam laporan-laporan yang dipublikasikan oleh perusahaan,

sehingga kepercayaan para pemangku kepentingannya akan semakin meningkat yang juga akan mempengaruhi dukungan dan investasi pada perusahaan. Maka semakin tinggi akuntabilitas perusahaan, semakin tinggi pula kemungkinan emisi karbon diungkapkan.

**HA<sub>2</sub>: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.**

### **2.6.3. Pengaruh Pertanggungjawaban Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon**

Menurut KNKG (2006), prinsip pertanggungjawaban dalam *corporate governance* berarti perusahaan harus taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta turut menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan terutama kepada masyarakat yang berada di sekitar perusahaan berada. Teori legitimasi juga menyatakan hal yang selaras dengan definisi prinsip pertanggungjawaban, dimana perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial agar perusahaan mendapat pengakuan atau legitimasi dari masyarakat, tidak hanya di sekitar perusahaan saja tetapi juga masyarakat luas. Perusahaan yang bertanggungjawab atas dampak lingkungan cenderung berusaha mengurangi dan mengungkapkan emisi karbonnya karena perusahaan berupaya menunjukkan keikutsertaannya dalam memperbaiki lingkungan kepada para *stakeholder*. Jadi, semakin tinggi responsibilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi juga kemungkinan pengungkapan emisi karbonnya.

**HA3: Pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.**

#### **2.6.4. Pengaruh Kemandirian Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon**

Menurut KNKG (2006), kemandirian yaitu dalam menjalankan seluruh kegiatan bisnisnya, setiap organ perusahaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa adanya dominasi oleh satu pihak ataupun adanya pengaruh serta gangguan dari pihak lain. Sehingga, perusahaan dapat mengambil keputusannya secara objektif. Dan perusahaan dengan independensi yang tinggi biasanya tidak terpengaruh oleh tekanan tertentu yang mengakibatkan perusahaan melenceng dari peraturan, tanggung jawab, kode etik, visi dan misi perusahaan. Salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh perusahaan yaitu adanya tanggung jawab sosial sesuai dengan teori legitimasi. Kemandirian dapat menciptakan lingkungan di mana perusahaan memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengungkapkan emisi karbonnya dalam laporan tahunan ataupun laporan keberlanjutan sebuah perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dengan mengungkapkan emisi karbon juga akan meningkatkan citra perusahaan, investasi dan dapat menarik perhatian masyarakat serta pelanggan yang sadar akan lingkungan. Maka dengan adanya independensi yang tinggi, juga semakin meningkatkan probabilitas perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbonnya.

**HA4: Kemandirian berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.**

## 2.6.5. Pengaruh Kewajaran dan Kesetaraan Terhadap Pengungkapan Emisi

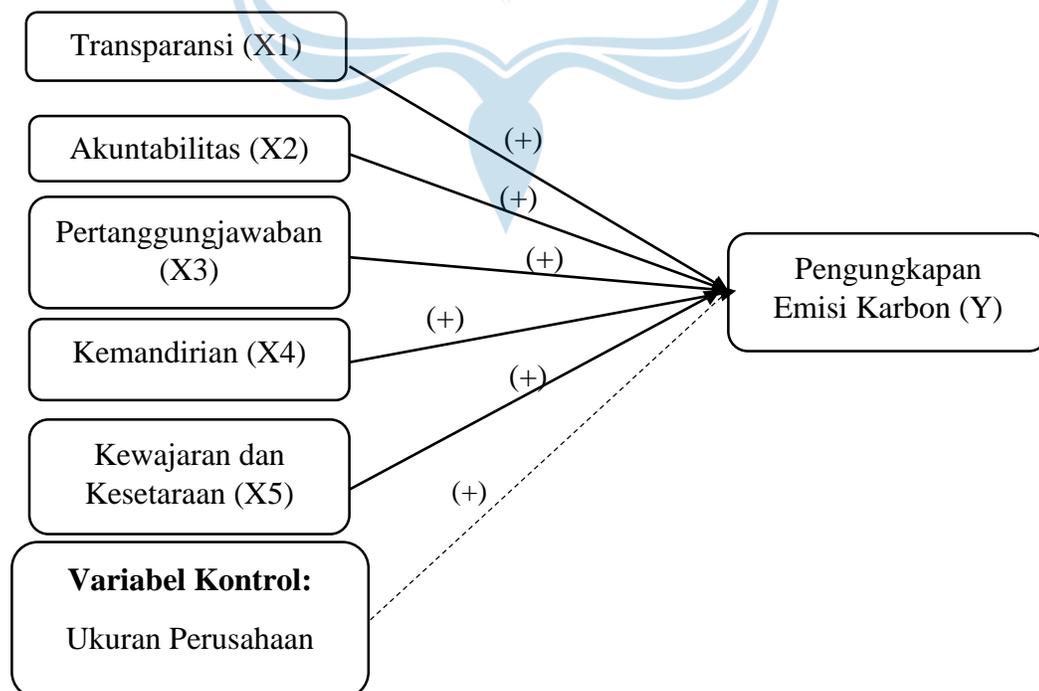
### Karbon

Menurut KNKG (2006), *fairness* berarti perusahaan harus memperlakukan para pemangku kepentingannya serta memenuhi hak-haknya secara adil. Mengetahui informasi-informasi perusahaan termasuk hak-hak para pemangku kepentingan. Sedangkan, kewajaran dapat dinilai dari opini auditor independen dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan emisi karbon juga termasuk salah satu cara perusahaan memenuhi hak para *stakeholder*-nya sejalan dengan teori *stakeholder*. Ketika perusahaan memenuhi kewajibannya kepada pemangku kepentingan, mereka cenderung menganggap pengungkapan emisi karbon sebagai aspek penting dari tanggung jawab sosial perusahaan. Dan dengan opini auditor yang baik, reputasi perusahaan di masyarakat pasti akan meningkat. Untuk menjaga reputasi dan menarik perhatian investor dan pemangku kepentingan lainnya, perusahaan dapat mengungkapkan emisi karbonnya. Dengan mengungkapkan emisi karbon, perusahaan dapat menunjukkan komitmen mereka untuk memenuhi kewajiban mereka kepada pemangku kepentingan, termasuk hak mereka atas informasi dan hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dan hal tersebut dapat mendorong para pemangku kepentingan untuk memberi dukungan dan investasi yang lebih pada perusahaan. Jadi, semakin tingginya prinsip kewajaran dan kesetaraan ini, akan semakin meningkatkan pengungkapan emisi karbon pada suatu perusahaan.

**HA5: Kewajaran dan kesetaraan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.**

## 2.7. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan. Lalu, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pengungkapan emisi karbon. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan. Pada penelitian ini diperlukan sebuah kerangka pemikiran agar pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan emisi karbon diketahui. Berdasarkan landasan teori serta hipotesis yang telah peneliti uraikan, maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**